

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang disebabkan oleh barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi keinginan dan tujuan bagi setiap negara maupun daerah. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kenaikan dalam kurun waktu tertentu maka perekonomian suatu negara tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan atau bernilai positif.¹

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada, sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah, dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.²

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi dan sebagainya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga ditunjang oleh faktor non ekonomi, seperti lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan dari negara tersebut.³

¹ Mawaddah, *Analisis Pengaruh JUB, Pembiayaan Mudharabah dan Kontribusi Dana ZIS Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 1.

² Hari Handoko, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ngawi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012), 1-2.

³ Yunan, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), 4-5.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan melalui tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB). Dimana PDB tersebut terbagi kedalam sembilan sektor ekonomi yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan perhotelan dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa lainnya. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) berarti meningkat pula kesejahteraan dan kemakmuran penduduk.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang dihitung melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dapat dijadikan indikator atas laju perekonomian Jawa Barat, dalam hal ini permintaan agregat dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, dan tingkat investasi. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (periode 2011 sampai dengan 2017) terlihat perubahan yang signifikan. Berikut adalah perkembangan PDRB di Jawa Barat sejak tahun 2011 sampai 2017.

Tabel 1
PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Jawa Barat Tahun 2011-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB
2011	1.275.546.477,15
2012	1.207.083.405,74
2013	1.149.216.057,05
2014	1.093.543.545,87
2015	1.028.409.739,51
2016	965.622.061,10
2017	906.685.760,40

Sumber: BPS Jawa Barat data diolah

Dari tabel 1 diketahui bahwa perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2011 mencapai 1.275.546.477,15 Juta Rupiah dan terus mengalami penurunan pada tahun 2017 sampai

906.685.760,40 Juta Rupiah. Ini membuktikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus mengalami penurunan yang sangat signifikan pada setiap tahunnya dan selalu mengalami penurunan meskipun nilainya berfluktuasi.

Pertumbuhan ekonomi sangatlah dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam menyeimbangkan kondisi perekonomian suatu negara. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang terkait dengan percepatan pengembangan sektor riil. Kebijakan sektor riil ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sektor riil atau disebut juga *real sector*, adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi.⁴ Sektor riil tersebut meliputi: industri pengolahan, pertanian, pertambangan, perdagangan, hotel dan restoran (PHR), dan lain sebagainya.

Namun, dalam penelitian ini akan lebih di fokuskan pada sektor riil industri pengolahan. Alasan peneliti memfokuskan penelitian sektor riil pada sektor industri pengolahan saja disebabkan karena, di lihat dari masing-masing sektor riil yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2011 sampai tahun 2017, nilainya selalu berfluktuasi meskipun menunjukkan kenaikan pada setiap tahunnya. Selain itu, di lihat dari pertumbuhan ekonomi dari segi penawaran sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan meskipun nilainya juga berfluktuasi dari tahun 2011 sampai tahun 2017.

⁴ Larasati. dalam "<http://digilib.unila.ac.id/1830/9/BAB%20II.pdf>" (diakses 22 desember 2016).

Tabel 2
Industri Pengolahan Melalui Sektor Riil dilihat dari PDRB ADHK menurut
lapangan usaha tahun 2011-2017
Di Jawa Barat (Juta Rupiah)⁵

Tahun	Industri Pengolahan
2011	403,571,246.62
2012	448,520,831.83
2013	487,760,807.98
2014	544,183,777.95
2015	604,759,573.10
2016	656,140,108.33
2017	702,139,263.54

Sumber: BPS Jawa Barat data diolah

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa industri pengolahan melalui sektor riil yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebesar 403,571,246.62 juta rupiah pada tahun 2011 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya mencapai 702,139,263.54 juta rupiah pada tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikatakan signifikan apabila mencapai angka 6%. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% yang berasal dari permintaan agregat, penawaran agregat, konsumsi, tabungan dan tingkat investasi. Sedangkan 2% dari jumlah pertumbuhan ekonomi dikeluarkan untuk membayar hutang dan subsidi, maka dalam hal ini negara bisa dikatakan surplus karena uang tidak habis digunakan untuk membayar hutang dan subsidi saja, melainkan negara masih bisa melakukan pembangunan agar negara lebih maju dan tidak tertinggal. Selain itu, dilihat dari sisi penawaran, penyumbang utama pertumbuhan PDRB Jawa Barat masih berasal

⁵ Bps Jawa Barat

dari sektor industri pengolahan. Untuk keseluruhan tahun 2011 sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 4,7% (yoy), pertumbuhan ini terutama ditopang oleh subsektor alat angkutan, mesin dan perlengkapannya serta subsektor makanan, minuman dan tembakau. Seiring dengan itu. Tingginya pertumbuhan sektor tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik dan membaiknya keyakinan dunia usaha terhadap kondisi perekonomian.⁶

Perlambatan pertumbuhan di sektor riil industri pengolahan dan sektor riil perdagangan tersebut disebabkan oleh melambatnya permintaan eksternal serta turunnya harga komoditas.⁷ Meskipun pertumbuhan pada sektor industri pengolahan nilainya berfluktuasi dari tahun 2011 sampai tahun 2017, namun sektor riil industri pengolahan terus mengalami pertumbuhan dan masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan PDRB dari sisi penawaran dalam sektor riil.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.⁸

Perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi berbagai krisis cukup memadai. Hal ini dibuktikan dengan hampir tidak ditemukan permasalahan dalam penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah dan tidak terjadi *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal dimaksud dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada

⁶BPS Jawa Barat_Laporan perekonomian

⁷Ibid.,

⁸Bank Indonesia

akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada warga masyarakat.⁹

Pertumbuhan dan kinerja positif sektor keuangan akan berkorelasi positif terhadap kinerja suatu negara. Sektor keuangan bisa menjadi sumber utama pertumbuhan sektor riil ekonomi. Semakin banyak alokasi dana pihak ketiga yang dialokasikan pada sektor-sektor riil maka akan semakin berkurang tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam sebuah perekonomian.¹⁰ Dalam sektor keuangan syariah penelitian akan lebih difokuskan pada pembiayaan yang disalurkan (PYD) yang ada di Bank Umum Syariah, dengan mengansumsikan kontribusi Jawa Barat terhadap keuangan syariah nasional, dimana provinsi Jawa Barat hanya berkontribusi 12,2 % terhadap keuangan syariah secara nasional.

Tabel 3
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah
Jawa Barat Tahun 2011-2017
(Juta Rupiah)

Tahun	Pembiayaan yang disalurkan (PYD)
2011	112.853.000
2012	142.148.000
2013	172.411.000
2014	187.813.000
2015	168.193.000
2016	172.951.000
2017	174.766.000

Sumber: OJK data diolah

Tabel 3 menunjukkan perkembangan terakhir indikator-indikator utama kinerja keuangan syariah yang ada di bank umum syariah di Jawa Barat. Perkembangan

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

¹⁰Ali Rama, *Analisis Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2010), 2.

Pembiayaan meningkat secara signifikan dari Rp 112.853.000 juta tahun 2011 menjadi Rp 174.766.000 juta pada tahun 2017.

Tabel 4
laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB, Sektor Riil Industry Pengolahan (IP) dan
Keuangan Syariah pada Pembiayaan Bank Umum Syariah
Jawa Barat Tahun 2011-2017
(Juta Rupiah)

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB	Industri Pengolahan	Pembiayaan Bank Umum Syariah
2011	1.275.546.477,15	403,571,246.62	112.853.000
2012	1.207.083.405,74	448,520,831.83	142.148.000
2013	1.149.216.057,05	487,760,807.98	172.411.000
2014	1.093.543.545,87	544,183,777.95	187.813.000
2015	1.028.409.739,51	604,759,573.10	168.193.000
2016	965.622.061,10	656,140,108.33	172.951.000
2017	906.685.760,40	702,139,263.54	174.766.000

Sumber: BPS Jabar, OJK

Berdasarkan data pada tabel 4 yang menggambarkan pertumbuhan dari PDRB cenderung mengalami penurunan, sedangkan Industri pengolahan dan pembiayaan keuangan pada Bank Syariah cenderung mengalami peningkatan secara signifikan di setiap tahunnya. Setiap peningkatan pada instrumen ekonomi baik yang bersifat kecil maupun menengah akan memberikan dampak terhadap perekonomian negara. Peningkatan yang dialami oleh industri pengolahan dan pembiayaan keuangan Bank Umum Syariah, baik secara langsung maupun tidak juga memberikan dampak terhadap perekonomian di Jawa Barat. Dampak yang ditimbulkan mungkin saja bersifat positif ataupun cenderung negatif, dengan segala program-program yang dibuat oleh Pemerintah pada masing-masing variabel tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti pengaruh sektor riil industri pengolahan dan keuangan syariah pada bank umum

syariah dilihat dari pembiayaan yang tercantum dalam otorisasi jasa keuangan (OJK) terhadap produk domestic regional bruto (PDRB) Jawa Barat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah sektor riil industri pengolahan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ?
2. Apakah pembiayaan keuangan syariah pada bank umum syariah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ?
3. Apakah sektor riil industri pengolahan dan pembiayaan keuangan syariah pada bank umum syariah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menguji sektor riil industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat
2. Menguji pembiayaan keuangan syariah pada bank umum syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat
3. Menguji sektor riil industri pengolahan dan pembiayaan keuangan syariah pada bank umum syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat

B. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya khasanah keilmuan yang berhubungan dengan pengaruh sektor riil dan keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengembangkan sektor riil dan keuangan syariah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
- b) Untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan ekonomi mikro dan makro.
- c) Dengan membaca karya tulis ini diharapkan pembaca mengetahui, memahami dan memiliki gambaran yang jelas mengenai sektor riil dan keuangan syariah dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi.
- d) Penting juga bagi peneliti berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian.

D. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian–penelitian sebelumnya yang menganalisis mengenai pengaruh sektor riil dan keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, antara lain:

- 1) Akhmad Ghofir, menganalisis pengaruh industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, dan pertanian terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Dalam penelitiannya Akhmad Ghofir memperoleh hasil bahwa ada pengaruh signifikan positif secara parsial antara sektor industri pengolahan terhadap PDRB di Kabupaten Mojokerto, sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB di Kabupaten Mojokerto, sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Mojokerto. Dan hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan positif secara bersama-sama dari sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, dan pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Mojokerto tahun 1999-2011.¹¹

¹¹Akhmad Ghofir Afandi dan Yoyok Soesatyo, *Pengaruh Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2013), 13.

- 2) Muhammad Azwar, menganalisis peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan analisis input output. Dalam penelitian ini menunjukkan dari hasil analisis ada keterkaitan bahwa sektor yang memiliki angka keterkaitan ke depan di atas rata-rata diantaranya sektor pertanian, sektor industri, dan sektor pertambangan galian. Sedangkan berdasarkan hasil analisis keterkaitan ke belakang menunjukkan bahwa sektor yang memiliki angka keterkaitan total ke belakang di atas rata-rata (keterkaitan ke belakang yang tinggi) pada perekonomian Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor pengangkutan komunikasi. Berdasarkan identifikasi hasil analisis keterkaitan antarsektor menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan, karena sektor tersebut memiliki angka keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang yang tinggi (diatas rata-rata).
- 3) Pradnyana, menganalisis pengaruh sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap produk domestik regional bruto kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB kota Denpasar, untuk mengetahui sektor mana yang lebih dominan pengaruhnya terhadap PDRB kota Denpasar, untuk mengetahui prediksi nilai trend PDRB kota Denpasar tahun 2014. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah positif terhadap PDRB kota Denpasar, artinya apabila sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat maka PDRB kota Denpasar juga akan meningkat.¹²
- 4) Ali Rama, menganalisis kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan analisis VAR (*Vector*

¹²Pradyana I Gusti Gede Oka, *Pengaruh Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan, hotel dan restoran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Denpasar*, Skripsi, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN, 2009) 89.

Autocorrelation Regression) yang memperlihatkan bahwa dalam jangka panjang perbankan syariah yang direpresentasikan melalui total pembiayaan dan deposit ada pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan riil output di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan uji kausalitas Granger membuktikan hipotesis *finance-led growth* pada model pertama, artinya perkembangan sektor keuangan (perbankan syariah) mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan hasil kausalitas Granger model kedua membuktikan hipotesis *bidirectional causality*, artinya sektor keuangan (perbankan syariah) dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saling mempengaruhi. Jika terjadi pertumbuhan sektor perbankan syariah maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara positif. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah akan mengalami perkembangan secara positif.¹³

- 5) Hayati, menganalisis peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan alat analisis regresi. Dalam penelitiannya menggunakan hasil uji regresi Hayati menemukan bahwa total aset perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan total pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan (positif) terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel total aset dan total pembiayaan bank syariah mampu menjelaskan sebesar 33,8% terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa peran perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi masih relatif kecil.¹⁴

¹³Ali Rama, *Analisis Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* (Malaysia: Internasional Islamic University Malaysia, 2010), 19-20.

¹⁴Safaah Restuning Hayati, *Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Jurnal: Indo-Islamika. 2014), 63.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan sinteta dari serangkaian teori yang tertuang dari tinjauan pustaka nantinya, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.

A. Sektor Riil

Sektor riil atau disebut juga *real sector*, adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi.

Menurut Irfan Syauqi, pertumbuhan ekonomi sangat bertumpu kepada sektor riil. Dalam teorinya, sektor riil ini diibaratkan sebagai mesin yang bisa menggerakkan roda perekonomian.¹⁵ Sebab, sektor riil adalah sektor yang nyata yaitu sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang ada di masyarakat. Apabila sektor riil terus mengalami kenaikan secara signifikan terhadap suatu negara, maka perkembangan perekonomian di negara tersebut bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang sangat baik.

1. Pengertian Industri Pengolahan

Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian sempit, industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi dibidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan,

¹⁵Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 23.

pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dengan produk tersebut di jual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.¹⁶

Industri mempunyai peranan sebagai (*leading sector*) sektor pemimpin, maksudnya dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Misalkan saja sektor pertanian dan jasa, sebagai contoh pertumbuhan sektor industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi suatu industri. Serta industri tersebut memungkinkan juga berkembangnya sektor jasa, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga pemasaran atau periklanan yang kesemuanya itu akan mendukung lajunya pertumbuhan industry.¹⁷

2. Peranan Sektor Industri Pengolahan dalam Perekonomian

Sektor industri pengolahan yakni sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industri selalu memiliki “dasar-tukar” (*terms of trade*) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemiliknya.¹⁸

¹⁶ *Ibid*

¹⁷Lincolyn Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta,2010), 442.

¹⁸ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Cet ke 5, (Jakarta: Erlangga, 1996), Tanpa hal.

3. Perkembangan Sektor Riil Industri Pengolahan

Tabel 5
Perkembangan industri pengolahan

Tahun	Industri Pengolahan
2011	403,571,246.62
2012	448,520,831.83
2013	487,760,807.98
2014	544,183,777.95
2015	604,759,573.10
2016	656,140,108.33
2017	702,139,263.54

Sumber: BPS Jawa Barat data diolah

Berdasarkan data badan pusat statistik 2017 (tabel 5), secara kuantitas, pencapaian sektor riil industri pengolahan cukup membanggakan dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 nilai dari sektor industri pengolahan sebesar 403,571,246.62 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya mencapai 702,139,263.54 juta rupiah pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan terus mengalami perkembangan setiap tahunnya dan menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB.

B. Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisiensi sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam.¹⁹ Dalam sistem keuangan Islami, sektor riil itulah yang akan

¹⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), 159.

menentukan tingkat pengembalian ke sektor keuangan, bukan sebaliknya. Karena sistem keuangan Islam menerapkan prinsip investasi pada sektor riil dan tingkat pengembalian atas pendanaan ditentukan oleh produktivitas dari sektor riil tersebut.²⁰ Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai peluang bisnis yang baik, memobilisasi simpanan, memonitor kinerja para manajer, memicu perdagangan, menghindari dan mendiversifikasi risiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah kepada alokasi efisiensi sumber daya, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat, yang pada gilirannya, mendorong pertumbuhan ekonomi.²¹

Hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi objek penelitian dalam berbagai literatur ekonomi pembangunan dan keuangan. Issu tentang keuangan dan pertumbuhan setidaknya telah dikemukakan sejak abad 19 oleh Joseph A. Schumpeter yang mengemukakan urgensi sistem perbankan dan pertumbuhan tingkat pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi melalui identifikasi dan pembiayaan pada sektor investasi yang produktif.

Pengembangan teori pertumbuhan ekonomi telah secara luas digunakan sebagai literatur dalam studi bidang pembangunan ekonomi, makro ekonomi dan bidang studi lain yang ada hubungannya. Beberapa dari teori tersebut diperkenalkan oleh Rostow, Harrod, Domar, Lewis dan Solow. Namun, hanya beberapa dari teori tersebut yang fokus terhadap peranan sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi yang lain, Harrod dan Domar berpendapat bahwa untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan maka diperlukan peningkatan investasi baru, sehingga rasio tabungan nasional dan pendapatan nasional menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.²²

²⁰*Ibid.*, 162.

²¹*Ibid.*, 15

²²Rama, *Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap pertumbuhan Ekonomi*, Skripsi, (Bandung: Pustaka UNISBA, 2003), 29.

Menurut Irfan Syauqi, pertumbuhan ekonomi selain bertumpu kepada sektor riil juga didukung oleh keuangan syariah. Dalam teorinya, keuangan syariah diibaratkan sebagai oli mesin yang dapat melancarkan jalannya perkembangan sektor riil dalam menggerakkan roda perekonomian.²³ Salah satu ciri utama lembaga keuangan syariah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor riil dan ekonomi adalah lembaga keuangan syariah yang lebih menekankan pada peningkatan produktivitas. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menekankan konsep *asset & production based system* (sistem berbasis aset dan produksi) sebagai ide utamanya. Mudharabah dan musyarakah adalah cerminan utama dari ide tersebut. Melalui pola pembiayaan seperti itu maka sektor riil dan sektor keuangan akan bergerak secara seimbang.²⁴

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar agama Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip:

- a) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak.

²³ Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: LP3ES, 2001), 23.

²⁴ Ali Rama, *Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap pertumbuhan Ekonomi*, Skripsi, (Bandung: Pustaka UNISBA, 2003), 29.

- b) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c) Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- d) Universal, yang bersifat tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alam*.

Lembaga keuangan syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi dari warga masyarakat maupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan. Karena itu, sistem bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tinggi maupun rendah. Suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan. Sebab, suku bunga yang rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan inflasioner, serta mendorong investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangkaan modal dan menurunnya kualitas investasi.

Ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal berikut:

- a) Dalam menerima titipan dan investasi lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.
- b) Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediasi institution berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
- c) Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan akhirat.

- d) Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa-menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam guna transaksi sosial.
- e) Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Berdasarkan ciri-ciri lembaga keuangan syariah yang dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa untuk membangun sebuah usaha, pada prinsipnya salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi, baik berupa uang dan/atau materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. semua hal itu harus selalu berdasarkan prinsip syariah.²⁵

1. Pengelolaan Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengelolaan bank umum syariah adalah jenis perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, giro, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat disesuaikan dengan itu. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikelola bank pembiayaan rakyat syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁶

2. Perkembangan Bank Syariah

Perkembangan sistem ekonomi syariah dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia terlihat semakin pesat. Langkah strategis pengembangan bank syariah yang berupa pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah melalui perubahan Undang-Undang perbankan NO. 10 tahun 1998 yang

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 58-60.

²⁶ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman*, (Yogyakarta: Ekonis, 2002), 133.

mengatur tentang landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁷

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia Desember 2014 (tabel 6), secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah cukup membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Pada tahun 2011 hanya ada 3 bank umum syariah, 26 unit usaha syariah, 114 bank pembiayaan rakyat syariah dengan total jumlah kantor mencapai 782 unit. Dalam rentang delapan tahun, dari tahun 2011 sampai 2017, pertumbuhan perbankan syariah lebih dari dua kali lipat. Jumlah bank umum syariah saat ini telah mencapai 11 unit dengan 23 unit usaha syariah. Selain itu jumlah bank pembiayaan rakyat syariah telah mencapai 163 unit dan total jumlah kantor mencapai 2922 unit.

Tabel 6
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	2013	2014	2015	2016	2017
BUS :					
Jumlah Bank	6	11	11	11	11
Jumlah Kantor	711	1215	1401	1745	1998
UUS :					
Jumlah Bank	25	23	24	24	23
Jumlah Kantor	287	262	336	517	590
BPRS :					
Jumlah Bank	138	150	155	158	163
Jumlah Kantor	225	286	364	401	402

Sumber: OJK data diolah

²⁷Ali Rama, *Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap pertumbuhan Ekonomi*, Skripsi, (Bandung: Pustaka UNISBA, 2003), 10-11.

C. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu tolak ukur utama untuk menilai perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan berkembangnya kegiatan ekonomi. Boediono menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan *output* perkapita dalam jangka panjang.²⁸

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi dan sebagainya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga ditunjang oleh faktor non ekonomi, seperti lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan dari negara tersebut.²⁹

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya.³⁰

2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Konsep pertumbuhan ekonomi masih digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Adapun indikator yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah *Growth Domestic Product*

²⁸Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Jogjakarta: BPFE,1995), 1.

²⁹Yunan, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi*, (Jakaeta: Salemba Empat 2011), 4-5.

³⁰Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press,1994), 10.

(GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam suatu negara dalam suatu periode.³¹

Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi menjadi dua :

- a) PDB Nominal (*nominal GDP*) adalah nilai produksi seluruh barang dan jasa berdasarkan harga yang tengah berlaku.
- b) PDB riil (*real GDP*) adalah nilai produksi seluruh barang dan jasa pada harga konstan.³²

PDB riil lebih baik dibandingkan dengan PDB Nominal dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan PDB riil tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, maka PDB riil merupakan ukuran yang tepat untuk mengetahui tingkat produksi barang dan jasa dari suatu perekonomian. Salah satu masalah yang timbul ketika menggunakan PDB riil adalah tingkat harga konstan yang dijadikan sebagai harga tahun dasar.

Ada beberapa pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan Nasional dengan Pendekatan produksi (Produk Domestik Bruto/PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. GDP dapat disebut nilai barang jadi yang diproduksi dari semua sektor industri yang ada di suatu negara. Sesuai dengan standar Internasional Standard Industrial Classification (ISIC), sektor industri tersebut adalah :
 1. Sektor Produksi Pertanian
 2. Sektor Produksi Pertambangan dan Penggalian
 3. Sektor Industri Manufaktur
 4. Sektor Produksi Listrik, Gas dan Air Minum

³¹ Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Alih bahasa: Chriswan Sungkono, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 6.

³² *Ibid*, 507.

5. Sektor Produksi Bangunan
6. Sektor Produksi Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Sektor Produksi Transportasi dan Komunikasi
8. Sektor Produksi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
9. Sektor Produksi Sewa Rumah
10. Sektor Produksi Pemerintah dan Pertanahan
11. Sektor Produksi Jasa Lainnya

Penghitungan pendapatan dengan konsep nilai tambah bertujuan agar terhindar dari perhitungan ganda (*double account*). GDP nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) adalah merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan GDP Riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan) adalah nilai mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.

- b) Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pengeluaran (*Gross National Product/GNP*)

GNP adalah nilai barang yang diproduksi baik di dalam negeri dan di luar negeri.

Rumus umum untuk pendekatan pengeluaran adalah :

$$Y = \text{Consumption} + \text{Investment} + \text{Government} + \text{Export} - \text{Import}$$

Dimana :

- Consumption adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga.
- Investment adalah investasi oleh sektor usaha.
- Government adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.
- Eksport dan Import adalah kegiatan yang melibatkan sektor luar negeri.

- c) Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pendapatan (*Net National Product/NNP*)

NNP adalah nilai barang yang diproduksi baik di dalam negeri dan di luar negeri. Pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima dari faktor produksi.

$$Y = \text{Sewa} + \text{Upah} + \text{Bunga} + \text{Laba}$$

Dimana:

- Sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah.
- Upah adalah upah untuk tenaga kerja.
- Bunga adalah bunga untuk pemilik modal.
- Laba adalah laba untuk pengusaha.

Peningkatan pendapatan nasional tentu saja merupakan kontribusi dari kegiatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta aktifitas ekspor-impor. Peningkatan angka masing-masing subsistem tersebut tentu saja harus didukung oleh kegiatan ekonomi dibawahnya, konsumsi didukung oleh industry pendukung seperti makanan, minuman dan ini membawa akibat kebutuhan sumber daya menjadi bertambah, termasuk manusia.

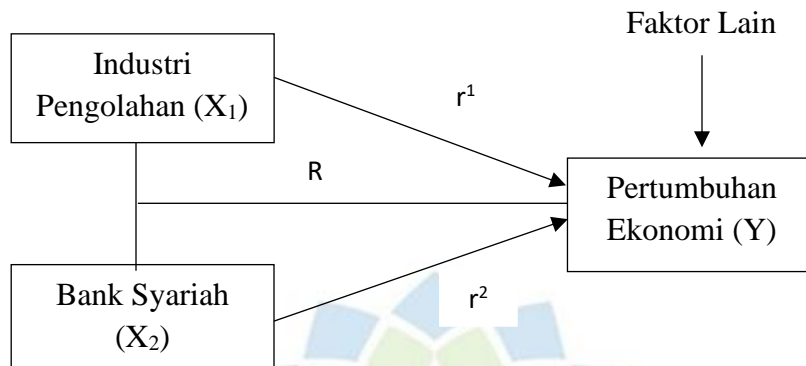
Sama halnya dengan pendekatan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, peningkatan produksi akan berdampak pada tingginya kebutuhan sumberdaya dalam setiap sektor yang digunakan dalam penyusunan angka PDB. Semakin banyak sumber daya (manusia) yang terlibat maka semakin besar kemungkinan terjadi distribusi pendapatan pada gilirannya akan mengurangi jumlah penduduk miskin.³³

Dari Penjelasan diatas, kita Tarik Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah apakah sektor riil industry pengolahan (X_1) dan pembiayaan keuangan syariah pada bank umum syariah (X_2) mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2017.

Berikut kerangka berfikir penelitian dengan judul “Pengaruh Industri Pengolahan Sektor Riil dan Pembiayaan Bank Umum Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017”.

³³Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta:Kencana Persada Media Group, 2008), 22.

Gambar 1 : Kerangka Berpikir



F. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, serta mengacu pada latar belakang, dan rumusan masalah maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis I

$H_0 : \beta_1 = 0$, tidak terdapat Pengaruh industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, terdapat Pengaruh industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

2. Hipotesis II

$H_0 : \beta_1 = 0$, tidak terdapat pengaruh pembiayaan bank umum syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, terdapat pengaruh pembiayaan bank umum syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

3. Hipotesis III

$H_0 : \beta_1 = 0$, tidak terdapat pengaruh industri pengolahan dan pembiayaan bank umum syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, terdapat pengaruh industri pengolahan dan pembiayaan bank umum syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

